

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Suriaman Mustari Pide, Hukum Adat; Dulu, Kini, Dan Akan Datang, Kencana, Jakarta 2017
- A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur, makassar, 2014.
- A.M.Yunus, Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua, Kencan, Jakarta Timur. 2018.
- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan,Ull Press, Yogyakarta 2004.
- Anwar, Yesmil & Adang,), Sosiologi Untuk Universitas,Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung 2013
- Erwin Muhammad, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT. Refika Aditama, Bandung 2011
- H.M. Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan PenatagunaanTanah,Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.
- Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty,Yokyakarta 1981
- Indiahon Dwiyanto, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Gava Media. Yogyakarta. 2014.
- Maria Rita Ruwiasuti, Sesat Pikir Politik Hukum Agraria : Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – Hak Adat, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2000.
- P.Joko Subagyo, Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya), PT.Rineka Cipta, Jakarta 2002
- Rosdalina, Hukum Adat, CV Budi Utama, Yogyakarta 2017
- Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar garafika, Jakarta 2014.

- Siti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press, Edisi Ketiga. 2005.
- Syafiie Inu Kencana, Pengantar ilmu pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta 2010.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Karakter Pembangunan di Indonesia, UI Press, Jakarta 1983.
- Soleman, B Taneko. Hukum Adat: suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang. PT. Eresco, Bandung 1947.
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 1982
- , Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cv. Widya Karya, Semarang 2009
- Taqwaddin, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara 2010
- Triatmodjo, Bambang. Teknik Pantai, Beta Offset, Yogyakarta 1999.:
- Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung 2015.
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2011
- Yuwono, Nur. Draft Pedoman Pengamanan dan Penanganan Pantai, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta 2005.

**Jurnal :**

- Kurnia Damaywanti, 2013, Dampak Abrasi Pantai terhadap Lingkungan Sosial, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan ISBN 978-602-17001-1-2 363

Muhammad Hatta A, Suriani, Nurhassanah. 2014. Eksternalitas Penambangan Pasir Pantai Secara Tradisional Terhadap Ekosistem Mangrove dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Merauke. Jurnal Menejemen Perikanan dan Kelautan Vol.1,2014,artikel 10.ISSN;2356-3907.

Sutrisno. 2015. Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Tanaman Mangrove Di Kabupaten Pati. Jurnal Bina Praja. Vol. 7 No 1

Philipus Betaubun, R. Abdoel Djamali, Didiek Hermanuadi, Rahmat Ali Syaban. 2016. Pemetaan Kognitif Penyebab dan Dampak Eksploitasi Pasir Sepanjang Sempadan Pantai di Kabupaten Merauke. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016, ISBN 978-602-14917-2-0.

Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik, Bayumedia Publishing 49. 2005. Yogyakarta:

Widiastuti Maria, Ruata, Aeiffin. Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pesisir Laut Merauke. J. Sosek KP Vol. 13 No. 1 Juni 2018: 111-123

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- PERDASUS PAPUA Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 05 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat Malind Anim.

**Internet :**

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Paternalisme> Diakses Pada 17 Oktober 2019
- <https://kbbi.web.id/tambang>, di unduh , 12 Maret 2020, Pukul 23.00 WIB
- <https://kkp.go.id/SKPT/Merauke/page/1120-profil-skpt-merauke> Diakses pada 06 Oktober 2020